

## **PENGARUH *TRICKLING DOWN* DAN EFEK POLARISASI PADA PEMBANGUNAN DAN PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG, BALI**

*Made Ratna Witari<sup>1)</sup>, Agus Wiryadhi Saidi<sup>2)</sup>*

E-mail : [ratna.witari@unr.ac.id](mailto:ratna.witari@unr.ac.id)<sup>1)</sup>, [agus.wiryadhi@unr.ac.id](mailto:agus.wiryadhi@unr.ac.id)<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> *Program Studi Arsitektur Universitas Ngurah Rai*

### **ABSTRAK**

Aktivitas ekonomi yang terjadi di sebuah wilayah akan mempengaruhi bagaimana perkembangan pembangunan di wilayah tersebut. Terdapat titik-titik pusat pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan pengaruh terhadap wilayah sekitarnya. Pengaruh yang dimaksud dapat berupa wilayah sekitarnya ikut berkembang atau justru menjadi tertinggal. Terdapat berbagai jenis kegiatan ekonomi salah satunya ialah kegiatan ekonomi pada sektor pariwisata. Penelitian ini dilakukan dengan memilih Kabupaten Badung yang terdapat di Provinsi Bali sebagai studi kasus karena Kabupaten Badung memiliki kegiatan pariwisata yang sangat pesat dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali. Kegiatan pariwisata di Badung hanya berpusat pada beberapa titik yang mengakibatkan adanya ketimpangan dan kurang meratanya pembangunan di wilayah Badung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung, mengetahui seberapa besar pengaruh teori *trickling down* dan efek polarisasi di Kabupaten Badung, serta mengetahui upaya yang dapat ditempuh untuk mencapai pemerataan pembangunan perekonomian di Kabupaten Badung. Data penelitian diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data deskripsi. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata di Badung merupakan sektor vital yang menjadi tumpuan perkembangan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Badung; *trickling down* dan efek polarisasi terjadi di Kabupaten Badung dengan skala wilayah yang berbeda; serta perlu adanya pengembangan sektor wisata lainnya di wilayah pinggiran Kabupaten Badung yang didukung dengan kebijakan pemerintah

Kata kunci: Pembangunan ekonomi, *Trickling down effect*, Efek polarisasi, Kabupaten Badung

### **ABSTRACT**

*Economic activity that occurs in a region will affect how the development of development in the region. There are points of economic growth centers that will have an impact on the surrounding area. The influence in question can be in the form of the surrounding area also developing or even being left behind. There are various types of economic activity, one of which is economic activity in the tourism sector. This research was conducted by choosing Badung Regency in Bali Province as a case study because Badung has very rapid tourism activities compared to other districts in Bali. Tourism activities in Badung are only centered on a few points which results in inequality and uneven development in the Badung area. This study aims to determine the influence of tourism development in Badung, to find out how much influence the trickling down theory and polarization effect have in Badung, and to find out the efforts that can be taken to achieve equitable economic development in Badung. The research data was obtained by conducting a literature study and the research was carried out using a qualitative approach which would later produce descriptive data. The final results of the study show that tourism activities in Badung are a vital sector on which economic development and development in Badung depend; trickling down and polarization effects occur in Badung with different regional scales; as well as the need for the development of other tourism sectors in the suburbs of Badung Regency which is supported by government policies.*

**Keywords:** *Economic development, Trickling down effect, Polarization effect, Badung Regency*

## 1. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang telah dan terus dilakukan oleh semua masyarakat di segala tingkatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi ini akan mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan waktu dan terjadi di setiap wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan perekonomian pada suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Hasyim, 2016). Perkembangan ekonomi dapat berdampak pada peningkatan pendapatan nasional yang tentu saja berimbas pada kehidupan masyarakat di berbagai wilayah. Indonesia sebagai negara berkembang sedang menata berbagai aspek pembangunan, salah satunya ialah aspek ekonomi. Perkembangan perekonomian di Indonesia bertitik pusat pada kota-kota besar yang kemudian berimbas pada pergerakan perekonomian di wilayah sekitar pusat perkembangan yakni daerah kabupaten atau kecamatan dalam berbagai jenis kegiatan perekonomian.

Salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami perkembangan perekonomian sangat signifikan yang berasal dari sektor pariwisata ialah Provinsi Bali. A adanya wisata alam dan budaya menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Perkembangan sektor pariwisata ini dapat secara nyata dirasakan seperti meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat. Bali sebagai daerah tujuan wisata telah memiliki kriteria daerah wisata seperti adanya atraksi, akomodasi yang mendukung kegiatan pariwisata, aksesibilitas yang baik, dan kelembagaan yang bertugas dalam hal pengelolaan pariwisata. Namun industri pariwisata di Bali ini sebagian besar hanya berpusat pada satu daerah yang mengakibatkan adanya ketimpangan dan kurang meratanya pembangunan wilayah di Bali.

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang pariwisatanya berkembang pesat jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kabupaten dengan luas 418,52 km<sup>2</sup> ini memiliki keunggulan yang terletak pada potensinya. Dengan ketinggian muka daratan antara 0-2075 mdpl menjadikan kabupaten ini memiliki bentang alam yang beragam, dari pantai hingga dataran tinggi berupa pegunungan. Selain kondisi alamnya, adanya atraksi wisata juga menjadikan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata utama di Pulau Bali (BPS Kabupaten Badung, 2022). Namun sebagian besar kegiatan pariwisata di Kabupaten Badung berpusat di wilayah Badung Selatan terutama di kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara seperti di wilayah Tanjung Benoa, Kuta dan Cangu. Hal tersebut juga didukung dengan adanya fasilitas penunjang yang sesuai dengan syarat tujuan wisata dengan berbagai macam jenis daya tarik wisata seperti wisata alam maupun wisata buatan.

Perkembangan pariwisata yang signifikan ini tentu saja berdampak pada sektor ekonomi yang terjadi di semua wilayah Kabupaten Badung. Namun kegiatan pariwisata yang hanya berorientasi di wilayah Badung Selatan menyebabkan kurang berkembang dan meratanya kegiatan wisata dan pembangunan di wilayah Kabupaten Badung lainnya. Terkait dengan uraian di atas, Kabupaten Badung dipilih sebagai studi kasus untuk mengkaji pembangunan ekonomi dengan teori *trickling down* dan efek polarisasi, sehingga selain dapat mengetahui pengaruh dari perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *trickling down* dan efek polarisasi di Kabupaten Badung, serta mengetahui upaya yang dapat ditempuh untuk mencapai pemerataan pembangunan perekonomian di Kabupaten Badung.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 *Trickling Down Effect*

Hirschman (1958) menyatakan *trickling down effects* merupakan suatu perkembangan meluasnya pembagian pendapatan. Hirschman adalah seorang pelopor teori pertumbuhan tidak seimbang. Secara geografis, pertumbuhan ekonomi pasti tidak seimbang, dimana kemajuan di suatu tempat (titik) menimbulkan tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan, dan dorongan-dorongan ke arah perkembangan pada tempat-tempat (titik-titik) berikutnya. Hirschman (1958) menyadari bahwa fungsi-fungsi ekonomi berbeda intensitasnya pada tempat yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi diutamakan pada titik awalnya sebelum disebarkan ke berbagai tempat lainnya. *Trickle down*

*effect* mengharapkan kegiatan ekonomi yang lebih besar dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di bawahnya yang memiliki lingkup yang lebih kecil. Namun, pada kenyataannya teori ini sulit berjalan seperti sebagaimana mestinya, justru terjadinya *trickle up effect* atau efek muncrat ke atas.

Masyarakat atas yang cenderung mendapatkan kemudahan secara ekonomi, justru lupa untuk membangun perekonomian kecil yang berada di bawahnya. Akibatnya, yang kaya menjadi semakin kaya, dan yang miskin menjadi semakin miskin. Oleh karena itu, pembagian pembangunan pun justru semakin dinikmati oleh kalangan atas. Teori *trickle down effect* dari pola pembangunan yang diterapkan di wilayah miskin di negara berkembang dirasa tidak berhasil memecahkan masalah pengangguran, kemiskinan dan pembagian pendapatan yang tidak merata, baik di dalam negara berkembang maupun antara negara maju dengan negara berkembang.

## 2.2 *Efek Polarisasi*

Pada suatu wilayah atau negara, terdapat beberapa titik pertumbuhan dimana menjadi tempat berkumpulnya industri karena mendapatkan beberapa kemudahan. Kesempatan investasi, lapangan kerja dan upah buruh relatif tinggi lebih banyak terdapat di daerah pusat pertumbuhan dari pada daerah belakang. Antara pusat dan daerah belakang terdapat ketergantungan dalam suplai barang dan tenaga kerja. Hal ini tergantung pada tingkat komplementaritas antara dua tempat tersebut. Jika komplementaritas kuat akan terjadi proses penyebaran pembangunan ke daerah belakang (*trickling down*) dan sebaliknya jika komplementaritas lemah akan terjadi pengaruh polarisasi (Keban, 1995).

Jika pengaruh polarisasi lebih kuat dari pengaruh penyebaran pembangunan maka akan timbul masyarakat dualistik, yaitu selain memiliki ciri-ciri daerah perkotaan modern juga memiliki daerah pedesaan terbelakang (Hammand, 1985, Catri, 1993). Walaupun terlihat suatu kecenderungan, Hirschman optimis dan percaya bahwa pengaruh *trickling down* akan mengatasi pengaruh polarisasi. Misalnya bila daerah perkotaan berspesialisasi pada industri dan daerah pedesaan berspesialisasi pada produksi primer, maka meluasnya permintaan daerah perkotaan harus mendorong perkembangan daerah pedesaan.

Dalam jangka panjang, kemudahan yang diperoleh di pusat akan membuat penyebaran pembangunan ke daerah sekitarnya. Pada pihak lain, berdasarkan konseptual yang serupa mengenai struktur titik-titik pertumbuhan dan daerah-daerah belakang, Myrdal (1957) menggunakan istilah *backwash effect* dan *spread effect* yang artinya persis serupa dengan polarisasi dan pengaruh *trickling down*. Myrdal berpendapat bahwa polarisasi muncul lebih kuat dari pada penyebaran pembangunan, permintaan faktor-faktor produksi akan menumpuk di daerah-daerah perkotaan yang memberikan manfaat ke daerah perkotaan, dan sebaliknya di daerah pedesaan yang tidak menguntungkan akan menipis.

Hirschman menyarankan agar membentuk lebih banyak titik-titik pertumbuhan supaya dapat menciptakan pengaruh-pengaruh penyebaran pembangunan yang efektif, sedangkan Myrdal menekankan pada langkah-langkah kebijaksanaan untuk melemahkan *backwash effect* dan memperkuat *spread effect* agar proses kausasi sirkuler kumulatif mengarah ke atas, dengan demikian semakin memperkecil ketimpangan regional (Murtomo, 1988, Catri, 1993, Keban, 1995).

Efek penyebaran menunjukkan dampak yang menguntungkan dari daerah yang makmur terhadap daerah yang kurang makmur, hal ini meliputi: meningkatnya permintaan komoditi primer, investasi dan difusi ide serta teknologi. Pada negara-negara terbelakang, efek penyebaran hanya terbatas pada daerah-daerah di sekitar pusat-pusat perkotaan (Murtomo, 1988, Keban, 1995). Pembangunan lama kelamaan tidak berimbang, pertumbuhan daerah yang sedang berkembang membatasi kapasitas pertumbuhan dimana-mana.

Myrdal dan Hirschman dengan teori polarisasi ekonominya telah mengetahui adanya daya kompensasi yang berlawanan, yakni efek arus balik atau polarisasi, yang akan menghambat perkembangan di seluruh negeri. Hirschman melihat bahwa secara geografis pertumbuhan mungkin tidak perlu berimbang. Dengan berlangsungnya waktu, efek-efek menetes ke bawah (*trickling down-effects*) akan dapat mengatasi efek polarisasi, dan hal yang demikian akan terjadi jika ada campur tangan negara (pemerintah) dalam perekonomian.

Myrdal dan Hirschman dengan teori polarisasi ekonomi menjelaskan perbedaan pembangunan/kemajuan antar core dan periphery (pusat-pinggiran). Menurut Myrdal, bila dalam

suatu wilayah didirikan industri, maka akan terjadi pemusatan penduduk di sekitar daerah industri tersebut. Penduduk di sini memerlukan pelayanan sosial dan ekonomi, sehingga menarik para penanam modal yang menyebabkan modal mengalir ke arah tersebut. Industri pertama mungkin juga menarik pendirian industri lainnya, baik yang menyediakan bahan mentahnya maupun industri yang mengolah bahan setengah jadi untuk industri pertama. Akan terjadi pertumbuhan yang makin lama makin pesat yang menimbulkan *backwash-effects* atau akibat yang menghambat pertumbuhan wilayah-wilayah lain dimana tenaga-tenaga terampil, modal barang-barang perdagangan ditarik ke arah tersebut. Daerah yang terkena *backwash-effects* ini makin lama menjadi makin mundur dan disebut *periphery* atau pinggiran (Henderink & Murtnomo, 1988: 26).

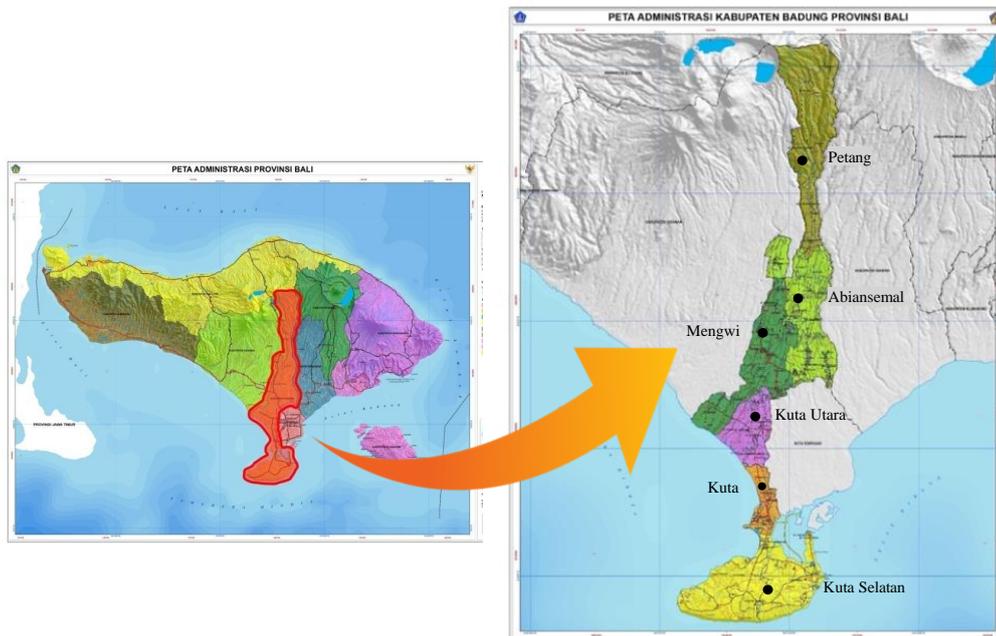
### 3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data berupa deskripsi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kasus Kabupaten Badung yang nantinya kondisi wilayah tersebut akan dikomparasikan dengan teori yang telah dipilih yaitu terkait *trickling down* dan efek polarisasi pada sebuah pembangunan. Data Kabupaten Badung sebagian besar difokuskan pada data tahun 2019, dimana pada saat tersebut belum terdapat pandemi Covid-19 yang memberikan pengaruh besar terhadap data pada umumnya.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.3.1 Gambaran Umum Kabupaten Badung

Kabupaten Badung merupakan salah satu dari sembilan kabupaten yang ada di Bali yang memiliki wilayah seluas 418,52 km<sup>2</sup> (7,43% dari luas Pulau Bali).



Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Badung  
Sumber: petatematikindo.wordpress.com

Bagian utara daerah ini merupakan daerah pegunungan yang berudara sejuk, berbatasan dengan kabupaten Buleleng, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran rendah dengan pantai berpasir putih dan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Bagian tengah merupakan daerah persawahan dengan pemandangan yang asri dan indah, berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar di sebelah Timur, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Tabanan. Secara administratif Kabupaten Badung terbagi menjadi 6 wilayah Kecamatan yang terbentang dari bagian Utara ke Selatan yaitu Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta, Kuta Utara dan Kuta

Selatan, yang terbagi menjadi 62 desa/kelurahan dan 120 desa adat (Tata Ruang Provinsi Bali, 2023). Adapun kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Desa dan Kelurahan di Kabupaten Badung

<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Kelurahan</b>
Kuta Selatan	Pacatu, Ungasan, Kutuh	Benoa, Tanjung Benoa, Jimbaran
Kuta	-	Kedonganan, Tuban, Kuta, Legian, Seminyak
Kuta Utara	Dalung, Canggu, Tibubeneng	Kerobokan Kaja, Kerobokan, Kerobokan Kelod
Abiansemal	Abiansemal, Angantaka, Ayunan, Blahkiuh, Bongkasa, Bongkasa Pertiwi, Darmasaba, Dauh Yeh Cani, Jagapati, Mambal, Mekar Bhuana, Punggul, Sangeh, Sedang, Selat, Sibang Gede, Sibang Kaja, Taman.	-
Mengwi	Baha, Buduk, Cemagi, Gulingan, Kekeran, Kuwun, Mengwi, Mengwitani, Munggu, Penarungan, Pererenan, Sembung, Sobangan, Tumbak Bayuh, Werdhi Bhuwana.	Abianbase, Kapal, Lukluk, Sading, Sempidi
Petang	Belok, Carangsari, Getasan, Pangsan, Pelaga, Petang, Sulangai	-

Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Badung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Badung)

#### 4.2 Peranan Pariwisata di Kabupaten Badung

Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi dua, yakni: kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung berasal dari pajak pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata pada kawasan wisata yang diterima langsung oleh dinas pendapatan suatu destinasi. Sedangkan kontribusi tidak langsung pariwisata terhadap pendapatan pemerintah berasal dari pajak atau bea cukai barang-barang yang di *import* dan pajak yang dikenakan kepada wisatawan yang berkunjung.

Menurut data BPS, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dan Indonesia dari tahun 2017 – 2019 terus mengalami peningkatan, meskipun setelah tahun 2019 mengalami penurunan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Adapun persentase kunjungan wisatawan ke Bali pada tahun 2019 yaitu sebanyak 38,9% dari total kunjungan wisatawan ke Indonesia. Hal ini menunjukkan peran Bali sebagai pintu utama kunjungan wisata ke Indonesia menjadi sangat penting. Strategi pengembangan pariwisata Indonesia juga menempatkan Bali sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Data dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia dan Bali (2015-2021)

<b>Tahun</b>	<b>Indonesia</b>		<b>Bali</b>	
	<b>Total</b>	<b>Growth (%)</b>	<b>Total</b>	<b>Growth (%)</b>
2017	14.039.799	21,88	5.697.739	15,62
2018	15.810.305	12,58	6.070.473	6,54
2019	16.106.954	1,88	6.275.210	3,37
2020	4.052.923	-74,84	1.069.473	-82,96
2021	1.557.530	-61,57	51	-

Sumber: <https://bali.bps.go.id/>

Di Provinsi Bali, daerah yang setiap tahunnya memberikan sumbangan tertinggi kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibandingkan dengan daerah lainnya yaitu Kabupaten Badung. Kurun waktu 5 tahun terakhir, PAD Kabupaten Badung menempati posisi pertama dan Kota Denpasar menempati posisi kedua. Meskipun PAD sebagian besar daerah sempat mengalami penurunan di

tahun 2020-2021, namun Kabupaten Badung tetap menjadi yang tertinggi di Bali. Daerah yang menerima PAD terendah yaitu Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana. Penerimaan PAD Kabupaten Badung terbilang sangat besar dan memiliki selisih yang sangat jauh dari Kota Denpasar yang merupakan Ibukota Provinsi Bali. Data dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Anggaran Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (2017-2021)

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Denpasar	1.008.710.712	940.110.335	1.010.779.481	731.261.281	792.362.414
Badung	4.172.457.396	4.555.716.407	4.835.188.460	2.116.974.302	1.750.345.226
Tabanan	426.635.751	363.370.469	354.558.239	313.042.530	362.314.361
Jembrana	121.342.475	126.477.267	133.698.784	148.045.103	185.004.035
Gianyar	662.753.475	770.204.849	997.478.368	545.869.873	430.172.109
Klungkung	153.210.776	186.974.284	225.063.772	220.893.875	254.494.496
Bangli	104.592.163	122.686.254	127.040.436	104.325.150	163.573.096
Karangasem	198.575.057	200.361.247	233.013.033	219.176.733	151.688.747
Buleleng	455.195.426	335.555.494	365.595.301	318.986.891	391.988.445

Sumber: <https://bali.bps.go.id/>

Dalam melaksanakan otonomi daerah, kabupaten atau kota melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perolehan PAD. Peningkatan perolehan ini didukung dengan adanya faktor dana yang merupakan penentu dalam mengetahui lancar tidaknya suatu pemerintahan. Terbatasnya kemampuan pendanaan suatu pemerintahan, maka akan mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat ikut terhambat. Tidak banyak yang dapat dilakukan jika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adanya keterbatasan sumber PAD dimana akan menyebabkan pelayanan tidak dapat diberikan secara optimal (Sukarya, 2012).

Kendala yang biasa dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu tingkat kesiapan keuangan yang berbeda pada setiap daerah. Kebijakan otonomi daerah adalah kebijakan yang menguntungkan daerah-daerah yang mempunyai sumber daya potensial namun bagi daerah yang kurang memiliki sumber daya potensial menganggap kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang tidak menguntungkan (Norregaard, 2013).

Era otonomi pemerintah dituntut untuk mandiri dalam melaksanakan fungsi dan memberlakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerah. Potensi-potensi daerah yang tersedia diharapkan mampu dimaksimalkan dengan baik agar pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya PAD. PAD akan diperoleh dari sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang dikelola ataupun yang berpotensi untuk dipungut pajak daerah yang dapat dioptimalkan dengan baik. Sumber-sumber pendapatan tersebut yang nantinya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien (Arsana, 2013).

Tabel 3.4 Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Badung (2017-2021)

Pendapatan Asli Daerah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Hasil Pajak Daerah	3.490,16 M	3.872,91 M	4.217,32 M	1.613,76 M	1.278,72 M
Hasil Retribusi Daerah	128,72 M	135,91 M	148,05 M	65,06 M	41,98 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	255,93 M	238,04 M	231,89 M	243,08 M	206,67 M
Lain-lain PAD Sah	297,65 M	308,85 M	237,93 M	195,08 M	222,98 M
<b>Total</b>	<b>4.172,46 M</b>	<b>4.555,72 M</b>	<b>4.835,19 M</b>	<b>2.116,98 M</b>	<b>1.750,35 M</b>

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Pada tabel 3.4 dapat dilihat bahwa hasil pajak daerah memberikan sumbangan tertinggi kepada PAD di Kabupaten Badung. Pada tahun 2017-2019 hasil pajak daerah Kabupaten Badung selalu mengalami peningkatan, dan mengalami penurunan di tahun 2020-2021 akibat adanya pandemi Covid-19. Tahun 2017 hasil pajak daerah memberikan sumbangan sebesar 3.490,16 milyar kepada PAD sampai 2 tahun berikutnya mengalami peningkatan yaitu sebesar 4.217,32 milyar pada

tahun 2019. Besarnya penerimaan pajak daerah disebabkan adanya komponen pajak daerah yang memberikan sumbangan tertinggi kepada pajak daerah.

**Tabel 3.5 Realisasi Penerimaan Masing-Masing Pajak Daerah Kabupaten Badung (2017-2021)**

Jenis Pajak	2017	2018	Tahun 2019	2020	2021
Pajak Hotel	2.030.881.730.888	2.236.311.260.005	2.469.152.695.978	670.803.265.683	258.041.477.940
Pajak Restoran	475.939.453.837	624.456.631.009	739.355.217.168	255.065.894.487	155.470.551.715
Pajak Hiburan	58.585.763.642	80.288.902.447	108.089.989.753	35.572.211.795	15.128.075.387
Pajak Reklame	5.083.832.535	2.339.863.129	2.743.783.063	888.400.639	752.235.350
Pajak Penerangan Jalan	133.418.468.059	137.523.792.755	147.730.527.873	117.079.252.250	95.167.537.647
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	117.135.000	40.867.000	19.873.924.369	49.545.000	14.610.000
Pajak Parkir	26.750.432.202	24.704.858.685	27.467.823.360	12.242.978.980	8.046.343.065
Pajak Air Tanah	61.833.665.204	63.502.870.562	73.465.265.502	40.293.440.694	30.595.286.483
Bea Perhotelan atas Tanah dan Bangunan	494.664.811.260	498.178.419.219	421.115.407.326	334.689.956.225	545.206.716.074
Pajak Bumi dan Bangunan	202.880.857.648	205.568.318.326	208.324.758.792	147.068.176.988	170.296.962.037
<b>Jumlah</b>	<b>3.287.275.292.627</b>	<b>3.872.915.783.137</b>	<b>4.217.319.393.184</b>	<b>1.613.753.122.741</b>	<b>1.278.719.795.698</b>

Sumber: <https://bapenda.badungkab.go.id/>

Berdasarkan Tabel 3.5 Pajak Hotel memberikan kontribusi terbesar kepada PAD Kabupaten Badung, jauh melampaui pajak-pajak lainnya. Penerimaan pajak hotel dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Tahun 2017 Pajak Hotel memberikan sumbangan sebesar 2.030.881.730.888 (dalam ribuan rupiah) dan tahun 2019 memberikan sumbangan sebesar 2.469.152.695.978 (dalam ribuan rupiah). Selain Pajak Hotel, kontribusi Pajak Restoran juga cukup besar menopang PAD Badung. Pajak Hotel dan Pajak Restoran dapat memberikan kontribusi terbesar kepada PAD karena Kabupaten Badung memiliki kawasan wisata Nusa Dua, kawasan wisata Kuta, dan kawasan wisata Tuban yang menjadi primadona kepariwisataan di Bali. Daerah Kabupaten Badung selain terdapat obyek wisatanya, potensi dari pajaknya juga dipengaruhi oleh pelaksanaan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*). MICE tersebut seperti KTT APEC, Penyelenggaraan *Miss World, Bali Democracy Forum (BDF)*, KTT Perubahan Iklim dan yang terbaru yaitu KTT G20 pada tahun 2022 serta acara-acara besar lainnya baik tingkat Nasional, Regional, ASEAN maupun Internasional.

#### 4.3 Gambaran Pariwisata di Kabupaten Badung

Dari data BPS, pusat pariwisata di Bali berada di Kabupaten Badung, yang dapat dilihat dari jumlah hotel berbintang di kabupaten ini sebanyak 308 hotel pada tahun 2021 dari total 403 hotel di Bali. Hingga saat ini, pengembangan pariwisata Bali masih terpusat di wilayah Bali Selatan terutama di wilayah Kuta Selatan dan Kuta. Terpusatnya kegiatan pariwisata di Bali juga menyebabkan ketidakmerataan pembangunan di Bali. Tingkat *human development index* Kabupaten Badung dan Kota Denpasar menjadi yang tertinggi di Bali dengan nilai masing - masing 82,13 dan 84,37 pada tahun 2022. Oleh karena itu, upaya pemerataan imbal hasil dari pariwisata di Bali menjadi tantangan bagi pengambilan kebijakan.

Terdapat beberapa perbedaan perkembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Badung, yang dimana masing-masing wilayah tersebut memiliki keunggulannya tersendiri. Seperti pada wilayah bagian selatan yaitu Kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara yang mengunggulkan keadaan alam berupa pantai sebagai daya tarik wisata yang meliputi Nusa Dua hingga Kuta. Sedangkan wilayah bagian utara berupa perkebunan maupun persawahan yang sebagian besar berada di Kecamatan Abiansemal, Mengwi, dan Petang. Hanya saja dalam pengembangannya masih terdapat ketimpangan pariwisata yang ada di Badung terutama dalam pengembangan wilayah selatan dan utara. Selain itu, perbedaan mencolok dari Badung bagian utara dan selatan dapat dilihat dari jumlah daya tarik wisata (DTW) yang ada pada wilayah tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Bali, tercatat pada tahun 2019 Kabupaten Badung memiliki 39 daya tarik wisata. Pada Badung bagian selatan (Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara) terdapat 3 DTW budaya, 21 DTW alam, dan 1 DTW buatan. Sedangkan Badung bagian utara

(Kecamatan Abiansemal, Mengwi, Petang) memiliki 5 DTW budaya, 8 DTW alam, dan 1 DTW buatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Badung (2019)

Kecamatan	Objek dan Daya Tarik Wisata		
	Budaya	Alam	Buatan
Kuta Selatan	2	18	0
Kuta	1	0	1
Kuta Utara	0	3	0
Abiansemal	1	2	1
Mengwi	3	2	0
Petang	1	4	0
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>2</b>

Sumber: <https://disparda.baliprov.go.id/>

Kondisi pariwisata di Badung Selatan dengan dibangunnya akomodasi pariwisata yang sedemikian rupa mengakibatkan daerah ini tergolong padat. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan pembangunan pariwisata khususnya yang berada di Badung Utara. Ketimpangan inilah yang membuat perlu adanya pengembangan pariwisata di Bali terkhusus di Badung Utara. Kondisi pariwisata di Badung Utara dilihat dari kunjungan wisatanya dapat dikatakan meningkat dari tahun ke tahun. Hanya saja kondisi yang ada di Badung Utara tidak setara dengan di Badung Selatan. Pada kenyataannya, potensi yang ada di wilayah Badung Utara kebanyakan belum digali dan dikembangkan lebih lanjut. Misalnya pengembangan kawasan wisata di Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Petang. Pada dua Kecamatan ini terdapat objek wisata spiritual Taman Mumbul di Desa Adat Sangeh, wisata ini masuk dalam *blue print* pengembangan pariwisata daerah yang diproyeksikan menjadi agrowisata, kemudian Agrowisata di Lawak Desa Adat Belok Sidan dan Air Terjun Nung-nung belum dikelola dengan baik di wilayah Petang (Metrobali, 2013). Berdasarkan kondisi ini maka diperlukan upaya pemerintah dalam memfasilitasi infrakstruktur, akomodasi wisata dan unsur-unsur penunjang lain dalam pengembangan desa wisata tersebut. Jadi terlihat bahwa Badung yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Bali melalui sektor pariwisata masih mengalami ketimpangan antara wilayah Badung Selatan dengan Badung Utara.

Sedangkan pada titik awal kegiatan wisata, telah terdapat perluasan pengembangan pembangunan dan kegiatan wisata. Seperti pada Kecamatan Kuta Selatan, titik awal kegiatan wisata berada pada wilayah Tanjung Benoa yang memiliki Nusa Dua, kemudian saat ini kegiatan wisata telah meluas ke semua kelurahan/desa yang ada di Kuta Selatan. Begitu juga dengan wilayah Kuta yang kegiatan wisatanya juga meluas ke Kedonganan, Tuban, Legian, Seminyak bahkan hingga ke Canggu.

#### 4.4 Upaya yang dapat dilakukan

Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan pembangunan antara Badung selatan dan utara, sebaiknya Badung membuat alternatif daya tarik wisata seperti pengembangan desa wisata. Akomodasi wisata di Kabupaten Badung dominan bahkan boleh dikatakan menumpuk berada di Badung Selatan karena tipologi dan tofografi daerahnya memang berbeda. Badung selatan lebih pada akomodasi dan atraksi wisata, Badung utara lebih pada konservasi. Karena itu, selain alternatif desa wisata, Badung Utara juga cocok dikembangkan agrikultural seperti agrowisata atau ekowisata. Selain dapat menyeimbangkan kegiatan wisata di bagian selatan dan utara, alternatif tersebut juga dapat memberikan keberagaman jenis wisata di Badung yang juga nantinya mempengaruhi pembangunan pada masing-masing wilayah tersebut. Pembangunan yang dimaksud dapat berupa infrastruktur dan sarana yang berhubungan dengan akses ke destinasi wisata, dan sarana pendukung kegiatan pariwisata di wilayah tersebut sehingga adanya pembangunan tersebut akan berpengaruh terhadap penataan di wilayah Badung utara.

Selain itu, untuk membantu menyeimbangkan perekonomian Badung utara dan selatan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkebunan/ agrikultural yang ada di Badung utara untuk mendukung kegiatan pariwisata di Badung selatan. Seperti hasil perkebunan dari Badung utara didistribusikan ke akomodasi wisata yang ada di Badung selatan sehingga akan membuat kedua belah

pihak saling membutuhkan dan dapat terus berkesinambungan. Namun semua upaya tersebut harus didukung oleh regulasi atau kebijakan oleh pemerintah setempat dalam bentuk Perda atau Perbup sehingga arah dan langkah-langkah pemerataan pembangunan antara Badung utara dan selatan akan lebih jelas.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Pariwisata di Kabupaten Badung merupakan sektor vital yang menjadi tumpuan perkembangan ekonomi serta jalur kesejahteraan di Kabupaten Badung mengingat sebagian besar PAD Kabupaten Badung berasal dari kegiatan pariwisata.
2. Efek polarisasi dan efek *trickle down* (arah kemakmuran-ke bawah) terjadi di Kabupaten Badung sebagai kabupaten dengan income tertinggi dan perputaran nilai ekonomi yang besar dan cepat. Efek polarisasi tercermin apabila perbandingan skala wilayah yang ditentukan merupakan gap antara Badung Utara dan Badung Selatan, sedangkan terjadinya teori *trickle down effect* terlihat pada pertumbuhan ekonomi adalah wilayah yang lebih sempit, seperti contoh Kuta sebagai *core* dan Tuban, Seminyak, Legian merupakan daerah yang terkena imbas Kuta sebagai *core* dalam *trickle down* itu sendiri.
3. Ketimpangan kesejahteraan antara Badung bagian utara dan Badung bagian selatan merupakan wujud dari teori polarisasi dan *trickle down* itu sendiri. Perlu adanya pembenahan terhadap perekonomian dengan mengembangkan desa wisata maupun ekowisata di kawasan utara untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang akan berujung pada pembangunan dan nilai kesejahteraan. Hal ini juga menjadi rekomendasi, karena mengingat potensi yang bisa dikembangkan pada daerah Badung bagian utara.
4. Ketimpangan juga dapat diatasi dengan memanfaatkan potensi Badung bagian utara berupa perkebunan untuk mendukung kebutuhan pariwisata di Badung selatan.
5. Terjadinya *trickle down* maupun efek polarisasi di setiap daerah dapat diakibatkan karena kebijakan pemerintah, sehingga dirasa perlu menentukan kebijakan yang mendukung terjadinya *trickle down* tanpa mengedepankan kepentingan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1988. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Awirya, Gunawan, Nurman. 2017. Upaya Pemerataan Kontribusi Pariwisata pada Perekonomian Bali. Jurnal: UNIAT
- Catri, Indra 1993. Teori dan Institusi Pengembangan Wilayah. Institut Teknologi Bandung.
- Hammond, Charles Whyone. 1985. Element of Human Geography. London: George Allen & UNWIN
- Hasyim, Ali Ibrahim. 2016. Ekonomi Makro. Jakarta: Kencana.
- Hirschman. 1958. The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale. University Press.
- Jhingan, M.L. 1993. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Raja. Grafindo Persada.
- Keban, Jeremias. 1995. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UGM.
- Murtomo. 1988. Regional and Rural Development Planning Series. Yogyakarta: UGM.
- Myrdal, Gunnar. 1957. Economic Theory and Underdeveloped Regions. London.
- Nurhadi. Konsep Teori Pembangunan Pusat Pinggiran dalam Kajian Geografi. Jurnal: Universitas Negeri Yogyakarta
- Taras, Artini. 2017. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. Jurnal: Universitas Udayana